

MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Rizki Ananda¹, Chintya Mutiara², Nur Haniza Syahira³,

Intan Sakinah⁴, Afdhal Kurnia Pratama⁵

¹PGSD FKIP Universitas Pahlawan

^{2,3,4,5}Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹rizkiananda.mhs.upi@gmail.com ²chintyamtr@gmail.com

ABSTRACT

This article highlights the quality of basic education services in Indonesia as a primary focus of the government's efforts to improve human resource quality. Various strategic measures have been implemented, including equitable distribution of facilities and infrastructure, enhancement of teacher quality, and expansion of education access for underserved communities. The adoption of technology and digital learning also plays a vital role in education transformation. By analyzing policies such as the New Student Admission (PPDB) and identifying existing challenges and solutions, this article aims to provide a comprehensive overview of the current state and development direction of basic education service quality in Indonesia.

Keywords: service quality, basic education, infrastructure, teacher quality, education access, PPDB, digitalization, education policy.

ABSTRAK

Artikel ini mengangkat isu mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia sebagai fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai langkah strategis telah ditempuh, mulai dari pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, hingga perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani. Selain itu,

penerapan teknologi dan digitalisasi pembelajaran menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan. Melalui analisis kebijakan seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta identifikasi tantangan dan solusi yang ada, artikel ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan arah pengembangan mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia.

Kata Kunci: mutu layanan, pendidikan dasar, sarana prasarana, kualitas guru, akses pendidikan, PPDB, digitalisasi, kebijakan pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar adalah pijakan awal yang sangat penting dalam membentuk karakter, keterampilan, dan masa depan anak-anak kita. Mutu layanan pendidikan dasar tak hanya memengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, tapi juga menentukan seberapa siap generasi muda menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Di Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk program wajib belajar 12 tahun, agar setiap anak bisa mendapatkan hak yang sama untuk belajar.

Namun, perjalanan menuju pendidikan yang merata dan berkualitas belum sepenuhnya mulus. Kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya guru yang kompeten, serta pengelolaan sekolah yang belum optimal. Ketimpangan kualitas antar daerah juga masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi memberikan peluang baru, tapi juga membawa tantangan tersendiri yang menuntut dunia pendidikan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri.

Selain peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, cara menyampaikan informasi kepada masyarakat juga sangat penting. Penggunaan bahasa yang tepat dan ejaan yang benar dalam pemberitaan

atau komunikasi publik dapat membantu masyarakat lebih memahami arah kebijakan pendidikan dan ikut mendukungnya. Sebaliknya, kesalahan dalam penyampaian informasi bisa menimbulkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan publik.

Melalui artikel ini, kita akan bersama-sama menelusuri berbagai persoalan dan solusi terkait mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia. Tak hanya itu, kita juga akan membahas pentingnya komunikasi yang baik dalam dunia pendidikan, termasuk bagaimana kesalahan ejaan dan tata bahasa dapat memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan menggambarkan secara mendalam bagaimana kondisi mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap berbagai sisi penting yang memengaruhi mutu layanan mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, hingga kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Untuk mengumpulkan data, digunakan beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, dilakukan studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur, dokumen kebijakan, laporan resmi,

hingga artikel berita yang relevan dengan topik. Studi ini menjadi pondasi teori sekaligus sumber informasi utama dalam proses analisis. Kedua, dilakukan analisis terhadap berita-berita dari media massa dan portal daring. Fokus utama dalam tahap ini adalah memahami isi berita, bagaimana bahasa digunakan, serta mengidentifikasi kesalahan ejaan dan tata bahasa yang bisa memengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu pendidikan.

Semua data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara sistematis. Dari analisis ini, diidentifikasi tema-tema penting terkait mutu layanan pendidikan dasar, seperti ketersediaan fasilitas, kualitas guru, kebijakan pendidikan, serta bagaimana informasi pendidikan disampaikan ke publik.

Untuk menjaga keakuratan dan objektivitas temuan, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber baik literatur, berita. Langkah ini membantu memperkuat validitas data yang diperoleh. Penelitian ini secara khusus berfokus pada mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia, dengan penekanan pada empat aspek utama: sarana dan prasarana, kualitas guru, kebijakan pemerintah, serta komunikasi informasi pendidikan. Penelitian ini tidak mencakup analisis kuantitatif mendalam ataupun

observasi lapangan yang luas, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kondisi Mutu Layanan Pendidikan Dasar di Indonesia

Mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis. Meski akses terhadap pendidikan dasar sudah mengalami kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir, kenyataannya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di berbagai wilayah Indonesia belum merata. Masih banyak ketimpangan yang terjadi, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, kualitas guru yang bervariasi, hingga kesenjangan akses bagi kelompok-kelompok yang kurang terlayani. Berikut ini beberapa aspek utama yang mencerminkan kondisi tersebut:

1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana sekolah yang layak menjadi dasar penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Sayangnya, masih banyak sekolah dasar terutama di daerah terpencil yang menghadapi berbagai keterbatasan. Data menunjukkan sekitar 15% sekolah dasar mengalami kondisi bangunan yang rusak berat, kekurangan ruang kelas,

dan belum memiliki fasilitas penting seperti perpustakaan, laboratorium sederhana, maupun akses internet. Tak sedikit pula sekolah yang belum memiliki toilet bersih atau air layak pakai.

Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar. Anak-anak belajar dalam ruang kelas yang sempit, rusak, bahkan kadang bocor saat hujan. Guru pun kesulitan menyampaikan materi karena minimnya media dan sumber belajar. Dalam situasi seperti ini, potensi siswa sulit berkembang secara maksimal, dan motivasi belajar mereka pun bisa menurun karena lingkungan sekolah yang kurang mendukung.

1.2 Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik

Guru adalah ujung tombak dalam dunia pendidikan. Namun, hingga saat ini tantangan dalam hal kualitas dan distribusi tenaga pendidik masih cukup besar. Hasil evaluasi kompetensi menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kemampuan minimum, khususnya dalam pelajaran inti seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Ini bukan semata soal kemampuan, tapi juga soal pelatihan dan pendampingan yang belum merata.

Kondisi menjadi lebih sulit di daerah-daerah terpencil, di mana kekurangan guru kerap kali menjadi masalah harian. Bayangkan, ada

sekolah dasar yang hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar semua kelas dan mata pelajaran. Sementara di kota-kota besar, kelebihan guru justru sering terjadi. Ketimpangan ini menyebabkan beban kerja guru di daerah tertinggal menjadi berat, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas pengajaran.

Kesejahteraan guru pun masih menjadi pekerjaan rumah. Guru yang sejahtera, tentu akan lebih bersemangat dan fokus dalam mendidik. Namun, masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh dari layak, bahkan kadang belum menerima tunjangan sesuai peraturan. Hal ini tentu berdampak pada motivasi dan profesionalisme mereka di lapangan.

1.3 Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum 2013 yang saat ini digunakan, sebenarnya dirancang untuk menyeimbangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak guru yang mengandalkan metode lama seperti ceramah dan hafalan. Pendekatan belajar aktif, eksploratif, dan berbasis masalah belum sepenuhnya diterapkan, baik karena keterbatasan pemahaman guru, maupun minimnya pelatihan yang relevan.

Di banyak sekolah, terutama yang memiliki anggaran terbatas, buku teks dan sumber belajar lainnya

juga belum memadai. Akibatnya, siswa kesulitan mendapatkan bahan belajar yang sesuai dengan kurikulum. Ketika bahan ajar terbatas dan metode mengajar masih monoton, pembelajaran menjadi kurang bermakna dan siswa kesulitan mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi.

1.4 Akses Pendidikan untuk Kelompok Marginal

Pemerintah telah berusaha memperluas akses pendidikan untuk semua anak, namun realitanya masih banyak anak-anak dari kelompok marginal yang belum bisa menikmati layanan pendidikan secara layak. Mereka yang berasal dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau yang tinggal di daerah terisolasi, kerap menghadapi hambatan yang berat. Biaya transportasi ke sekolah yang tinggi, minimnya fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, atau bahkan stigma sosial, menjadi dinding penghalang yang sulit ditembus.

Pendidikan seharusnya menjadi hak setiap anak, bukan sebuah kemewahan. Namun bagi sebagian anak Indonesia, sekolah masih terasa seperti impian yang jauh. Mereka tidak hanya butuh bangunan sekolah, tetapi juga sistem yang inklusif dan mendukung kebutuhan mereka sebagai individu yang unik.

2. Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya

Pemerintah Indonesia terus berupaya membenahi kualitas layanan pendidikan dasar melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Tujuannya sederhana namun mulia: agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, antara kebijakan di atas kertas dan realita di lapangan, seringkali ada jarak yang perlu dijembatani dengan kerja nyata, koordinasi yang solid, dan keberpihakan pada kelompok yang paling membutuhkan.

2.1 Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program Wajib Belajar 12 Tahun menjadi tonggak penting dalam upaya menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dengan memperpanjang masa belajar hingga tingkat menengah atas, pemerintah berharap tak ada lagi anak yang berhenti sekolah karena keterbatasan. Pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi demi masa depan yang lebih cerah.

Namun, kenyataannya tak selalu semudah itu. Di banyak wilayah terpencil, sekolah menengah masih sulit dijangkau, baik karena jarak yang jauh maupun kondisi geografis yang sulit. Di sisi lain, keluarga dari latar belakang ekonomi lemah juga masih bergulat dengan biaya transportasi, perlengkapan

sekolah, hingga kebutuhan sehari-hari. Bantuan pemerintah, seperti beasiswa dan subsidi, sangat membantu, namun perlu dipastikan benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan.

2.2 Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka hadir sebagai angin segar bagi dunia pendidikan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, mendorong kreativitas, dan membentuk karakter serta kompetensi yang lebih relevan dengan dunia nyata. Tak lagi terpaku pada hafalan, siswa diajak berpikir kritis, berdiskusi, dan mengembangkan potensi dirinya.

Namun, menjalankan kurikulum ini butuh kesiapan luar biasa. Guru perlu didampingi dan dilatih agar siap menjadi fasilitator pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Sekolah juga membutuhkan sumber belajar yang memadai, termasuk bahan ajar digital dan sarana penunjang lainnya. Perubahan ini tidak bisa hanya bergantung pada semangat, tapi juga dukungan yang nyata dan merata.

2.3 Peningkatan Kompetensi Guru

Tidak ada pendidikan yang hebat tanpa guru yang hebat. Pemerintah menyadari hal ini dan terus mendorong peningkatan kualitas guru melalui pelatihan,

sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Tujuannya agar para guru tidak hanya mumpuni dalam bidang akademik, tapi juga mampu membimbing siswa dengan empati dan semangat mendidik.

Namun, peningkatan kompetensi tidak bisa bersifat seragam. Program yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di samping itu, perlu ada bentuk apresiasi nyata bagi guru yang terus berkembang, serta dorongan moral dan finansial agar mereka tetap bersemangat mengajar, terutama di daerah-daerah yang penuh tantangan.

2.4 Alokasi Anggaran Pendidikan

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan—sebuah bentuk komitmen konstitusional yang patut diapresiasi. Anggaran ini menjadi tulang punggung berbagai program, mulai dari pembangunan sekolah hingga pengadaan buku, pelatihan guru, dan bantuan pendidikan bagi siswa.

Namun, seperti halnya rumah besar, pengelolaan dana pendidikan juga membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Anggaran yang besar bukan jaminan jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,

bukan terhenti di meja birokrasi atau bahkan hilang karena penyimpangan.

2.5 Reformasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Reformasi pendidikan menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Melalui pembaruan kurikulum, sistem penilaian, dan manajemen sekolah, pemerintah berusaha agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk dunia kerja dan kehidupan sosial.

Namun, reformasi tidak bisa berjalan sendiri. Perubahan butuh partisipasi semua pihak—guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, hingga masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas dan dukungan bersama, reformasi akan terasa seperti beban alih-alih harapan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan terbuka sangat diperlukan agar semua bisa ikut merasa memiliki perubahan ini.

2.6 Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan yang diberikan, meski tampak sederhana seperti seragam, buku, atau uang transport, sangat berarti bagi banyak anak agar tetap bisa bersekolah tanpa rasa malu atau takut putus sekolah.

Namun, agar program ini benar-benar berdampak, perlu ketepatan sasaran dan pengawasan yang ketat. Tak hanya memastikan dana diterima oleh siswa yang berhak, tetapi juga menjamin bahwa proses penyaluran tidak tersendat oleh birokrasi atau praktik tidak adil. Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok yang menghalangi mimpi anak-anak Indonesia.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Dasar

Upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia ibarat mendaki bukit panjang yang penuh batu dan rintangan. Meski berbagai kebijakan dan program telah digulirkan pemerintah, di lapangan masih banyak kendala yang menyulitkan pencapaian pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata untuk semua anak bangsa. Tantangan-tantangan ini bersifat kompleks dan saling terkait, menyentuh berbagai aspek mulai dari akses, kualitas, hingga sistem pendukung pendidikan.

3.1 Keterbatasan Akses Pendidikan

Di banyak pelosok negeri, pendidikan masih terasa sebagai kemewahan. Anak-anak harus berjalan jauh melewati hutan, menyeberang sungai, atau naik perahu untuk bisa sampai ke sekolah.

Bagi sebagian dari mereka, perjalanan ke sekolah bukan hanya melelahkan, tapi juga berisiko. Hal ini tentu berdampak pada semangat dan kehadiran mereka.

Tak hanya soal jarak, faktor ekonomi keluarga juga menjadi kendala besar. Banyak orang tua terpaksa menghentikan pendidikan anak demi membantu menambah penghasilan keluarga. Pilihan sulit ini membuat angka putus sekolah masih tinggi, terutama di daerah miskin dan terpencil.

3.2 Kualitas Pendidikan yang Belum Merata

Kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa masih sangat terasa. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki guru yang lebih terlatih, fasilitas lengkap, dan akses ke teknologi. Sementara itu, di banyak desa, guru masih harus mengajar dengan alat seadanya, bahkan terkadang sendirian mengajar beberapa kelas sekaligus.

Distribusi guru yang tidak merata menjadi salah satu akar masalahnya. Guru-guru berkualitas cenderung menumpuk di kota, sementara daerah terpencil seringkali kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima siswa secara langsung.

3.3 Kurikulum yang Belum Sepenuhnya Relevan

Kurikulum kita memang sudah beberapa kali diperbarui, tapi tantangan belum selesai. Banyak yang menilai kurikulum masih terlalu berat pada hafalan dan teori, belum cukup memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berkreasi, dan belajar memecahkan masalah nyata.

Dalam dunia yang berubah cepat seperti sekarang, pendidikan yang tidak adaptif akan tertinggal. Guru pun masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan pendekatan belajar yang inovatif karena keterbatasan pelatihan dan sumber daya.

3.4 Kesejahteraan Guru yang Belum Memadai

Banyak guru, terutama di daerah, masih hidup dalam keterbatasan. Gaji kecil, tunjangan tidak pasti, dan beban kerja berat menjadi bagian dari realitas yang mereka hadapi setiap hari. Padahal, guru adalah pilar utama pendidikan. Tanpa dukungan dan penghargaan yang layak, sulit berharap mereka bisa mengajar dengan sepenuh hati.

Tak sedikit guru honorer yang mengabdikan selama bertahun-tahun namun belum diangkat menjadi pegawai tetap. Kondisi ini tentu memengaruhi semangat dan komitmen dalam menjalankan tugas mendidik generasi bangsa.

3.5 Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

Banyak sekolah di Indonesia masih belum memiliki ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas olahraga. Bahkan, ada sekolah yang atapnya bocor, dindingnya retak, atau lantainya masih tanah. Hal-hal ini jelas memengaruhi kenyamanan dan kualitas pembelajaran.

Tanpa dukungan sarana yang memadai, guru dan siswa sulit mencapai hasil belajar yang optimal. Keterbatasan ini juga menghambat implementasi pembelajaran berbasis teknologi, yang kini semakin penting.

3.6 Supervisi dan Manajemen Sekolah yang Lemah

Pengawasan dan manajemen sekolah yang lemah turut menjadi penghambat. Banyak sekolah belum dikelola secara profesional. Perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga masalah di kelas sulit terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat.

Peran kepala sekolah dan pengawas pendidikan sangat penting di sini. Namun, tidak semua memiliki kapasitas dan pelatihan yang cukup untuk menjalankan fungsi manajerial dan supervisi dengan efektif.

3.7 Rendahnya Mutu Hasil Belajar

Meski banyak siswa telah menuntaskan pendidikan dasar, hasil belajar mereka belum menunjukkan

kualitas yang diharapkan. Banyak siswa belum mampu memahami bacaan secara mendalam, atau menyelesaikan soal matematika dasar dengan baik. Standar kelulusan pun seringkali longgar, namun tetap sulit dipenuhi oleh sebagian siswa.

Hal ini berkaitan erat dengan metode pengajaran yang masih berpusat pada guru, minimnya media pembelajaran interaktif, dan rendahnya dukungan sumber belajar di sekolah.

3.8 Tantangan dalam Pendidikan Inklusi

Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih belum sepenuhnya mendapatkan hak pendidikan yang setara. Banyak guru belum memiliki pengetahuan dan pelatihan yang memadai untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Di sisi lain, sekolah-sekolah sering belum memiliki fasilitas pendukung, seperti alat bantu belajar atau lingkungan yang ramah disabilitas.

Yang juga menyedihkan, masih ada stigma dan kurangnya penerimaan terhadap ABK di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil untuk semua.

D. Kesimpulan

Mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia masih

menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti ketimpangan sarana dan prasarana, kualitas guru yang belum merata, serta terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok marginal. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis seperti Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Kurikulum Merdeka, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh distribusi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya merata, baik dalam hal pengajaran maupun fasilitas, semakin memperburuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Di tengah tantangan ini, sangat penting bagi seluruh elemen—pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat—untuk bekerja bersama dalam mengatasi masalah yang ada dan memperkuat sistem pendidikan. Fokus utama harus pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana pendidikan, serta penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua anak Indonesia. Selain itu, komunikasi yang jelas dan akurat dalam menyampaikan informasi pendidikan juga sangat penting, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan pendidikan yang diterapkan. Hanya dengan kerjasama dan perhatian bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan

pendidikan yang layak dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021: Inclusion and Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- World Bank. (2020). *Indonesia's Education Sector Review: Improving Quality and Access*.

Washington, D.C.: World Bank.	Sari, R. (2021). Pendidikan Inklusi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. <i>Jurnal Pendidikan Inklusi</i> , 5(2), 123-135.
Zubaidah, S. (2018). Kualitas Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. <i>Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan</i> , 3(1), 45-60.	Supriyadi, A. (2020). Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia. <i>Jurnal Teknologi Pendidikan</i> , 12(3), 201-215.